



---

**PENGARUH BESARAN PEREKONOMIAN, TINGKAT UPAH DAN  
INFLASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2014-2018**

**Endah Kurnia Lestari<sup>1\*</sup>, Sunlip Wibisono<sup>1</sup>, Dimas Sa'bandianto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember, Indonesia

\* Corresponding Author: [dimassabandianto@gmail.com](mailto:dimassabandianto@gmail.com)

---

---

**Abstract**

*The purpose of this study is that the government is expected to focus more on developments (GDP), especially in the manufacturing sector which has a high level of employment. The data used in this research is secondary data obtained from BPS and internet website browsing as a support. While the method used in this study is the panel data regression analysis method with the REM method with the help of Eviews 9 software. The results of this study indicate that the GRDP variable (X1) has a significant effect with a positive relationship to LFPR, the Minimum Wage variable (X2) has a significant and negative effect against TPA. Job opportunities in Java are influenced by 99.6% by HDI, GRDP, UMP and inflation while the remaining 0.4% is influenced by other factors.*

---

**Informasi Naskah**

Submitted: 4 Juni 2021

Revision: 28 Januari 2021

Accepted: 3 Maret 2022

---

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja, PDB, Tingkat Upah, Kesempatan Kerja

---

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini diharapkan pemerintah lebih fokus memperhatikan perkembangan (PDRB) terutama pada sektor industri pengolahan yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS dan browsing website internet sebagai penunjang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan metode REM dengan bantuan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap TPAK, variabel Upah Minimum (X2) berpengaruh signifikan dan negatif, melawan TPAK. Kesempatan kerja di pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, PDRB, UMP dan inflasi sedangkan sisanya 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

# 1 PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi berperan penting bagi suatu negara. Sumber daya manusia memang memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu proses pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan di semua bidang kehidupan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan rencana tertentu. Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian upaya dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan perekonomian agar tersedia lebih banyak infrastruktur. Untuk membangun bangsa dibutuhkan sumber daya alam dan manusia. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola diri sendiri dan segala potensi yang ada di alam menuju tercapainya kesejahteraan hidup yang seimbang dan berkelanjutan sehingga menyatu dengan manusia. sumber daya yang tersedia dengan baik akan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya seperti tingkat pendidikan, semakin tinggi teknologi meningkat dan perusahaan semakin maju dan berkembang, sehingga kesempatan kerja akan meningkat, tingkat pendidikan akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi sebagai akibatnya. peningkatan ini. pendapatan masyarakat (Sukirno, 2006: 3).

Pembangunan ekonomi merupakan kombinasi dari perkembangan pendapatan riil (total output) dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini sangat penting karena pertumbuhan penduduk berkaitan dengan ketersediaan pangan dan sumberdaya berwujud yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang akan mempengaruhi kualitas hidup penduduk itu sendiri. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah tingginya pertumbuhan penduduk di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan pembangunan ekonomi, khususnya masalah ketenagakerjaan (Subandi 2011: 89).

Tenaga kerja merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam masalah pembangunan. Penyerapan tenaga kerja dibutuhkan dalam distribusi pendapatan yang akan berdampak pada pembangunan. Penghasilan yang diperoleh masyarakat hampir seluruhnya diperoleh dari upah yang diberikan pada bidang pekerjaannya. Jumlah pendapatan yang diterima pekerja menentukan jumlah kemakmuran suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat

kesejahteraannya. proses pembangunan yang membuat perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional yang juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2000: 125). Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Padahal, proses pembangunan ekonomi membutuhkan berbagai upaya yang selaras dengan upaya masyarakat. Dia tidak menggambarkan gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa ekonomi telah merosot beberapa kali sebelum tingkat pembangunan tertinggi tercapai. Jadi menurut Malthus, proses pembangunan adalah proses naik turunnya kegiatan ekonomi, lebih dari sekedar lancar tidaknya kegiatan ekonomi. Malthus (1776-1824) menekankan pada pembangunan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara yang bergantung pada jumlah penduduk yang dihasilkan oleh angkatan kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai produknya.

Pada negara berkembang seperti Indonesia, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya (Todaro dan Smith, 2000:93).

Hal ini terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga, hal tersebut (positif atau negatifnya penambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi) sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan (Todaro dan Smith, 2000:94). Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki letak strategis di pulau Jawa. Hal ini disebabkan letak Jawa Timur yang menjadi pintu gerbang perdagangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Posisi strategis tersebut membuat kegiatan perekonomian di Jawa Timur berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat Besaran Perekonomian Jawa Timur serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya daerah, pembangunan ekonomi daerah mengalami kemajuan dari segi nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut diwujudkan dalam nilai Besaran Perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Seperti pada Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari laju pertumbuhan PDRB yang diharapkan dapat mencipt-

takan lapangan kerja baru belum terealisasi secara optimal. Perannya yang besar dalam perekonomian nasional menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur benar benar menjadi wujud keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dari segi makro ekonomi. Disadari pula bahwa keberhasilan urusan makroekonomi tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa agenda pembangunan ekonomi daerah akan terus berlanjut dalam jangka panjang untuk membuahkan hasil seperti ini.

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan manusia yang mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh upah. Upah yang ditetapkan di tiap provinsi berbeda-beda sesuai dengan Upah Minimum masing-masing provinsi. Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk semua kabupaten / kota dalam satu provinsi. Sebelumnya Upah Minimum Provinsi dikenal dengan Upah Minimum Tingkat Daerah. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Upah ditetapkan setiap tahun dan melalui proses yang panjang. Dewan Pengupahan Daerah (DPD) membentuk tim survei dan turun ke lapangan untuk mengetahui harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, pegawai dan buruh. Setelah dilakukan survei di sejumlah kota di provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Pasal 1 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum yang berlaku untuk semua kabupaten / kota dalam satu ketentuan disebut Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten / kota (UMK). UMP ditetapkan oleh gubernur, selain itu gubernur juga dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati / walikota. Ukuran himpunan UMK lebih besar dari UMP.

Dengan demikian upah minimum juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Konsep upah minimum berarti pekerja akan mendapatkan upah yang setara dengan kebutuhan hidup minimum untuk dirinya dan keluarganya. Upah minimum di sini tidak termasuk kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. Awalnya, upah minimum ditetapkan secara terpusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk daerah atau daerah di selu-

ruh Indonesia. Penetapan upah minimum dengan memperhatikan faktor-faktor seperti: kemampuan perusahaan, keadaan ekonomi daerah atau nasional, tingkat upah pada sektor atau subsektor yang sama di daerah atau provinsi lain, taraf hidup kebutuhan pekerja dan keluarganya (Priono, E. 2011).

Penelitian Dewi (2013) tentang pengaruh inflasi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jawa Timur menemukan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Ketika upah meningkat 1%, kesempatan kerja juga meningkat sebesar 1.604143961. Kenaikan upah ditandai dengan peningkatan konsumsi pekerja, sehingga terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan barang dan jasa akan menyebabkan produksi barang dan jasa perusahaan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk muda yang memasuki pasar tenaga kerja dan untuk memperluas lapangan kerja. Karena jika terjadi ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan atau perluasan lapangan kerja maka akan mengakibatkan tingginya pengangguran yang selanjutnya akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi tenaga kerja yang ada serta peningkatan beban masyarakat. Ini adalah sumber utama kemiskinan, mendorong keresahan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurut Sukirno dalam Hutagalung (2013) Inflasi mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga barang-barang dan jasa akhirnya juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akan turun, dan berakibat perusahaan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga jumlah angkatan kerja yang bekerja menurun. Jadi diduga tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Penelitian yang dilakukan Novianti (2013) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Ini berarti semakin bertambahnya tingkat inflasi berarti semakin berkurang penyerapan tenaga kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat inflasi maka semakin bertambah tenaga yang mampu diserap. Penelitian lainnya yang dilakukan Beyer dan Farmer (2007) di Amerika Serikat periode 1970-1999 mengi-

identifikasi bahwa ada hubungan yang positif antara inflasi terhadap pengangguran. Tingkat inflasi dapat mengukur bagaimana baik atau buruknya masalah perekonomian yang dihadapi suatu negara. Dalam mengukur hubungan terkait dalam masalah perekonomian, menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Apabila tingkat inflasi naik maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya. Kesempatan kerja merupakan banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi (Disnakertrans, 2002). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kesempatan kerja itu timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh PDRB, laju pertumbuhan inflasi, upah minimum, maju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

## 2 METODE

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dan pengujian hipotesis.

### 2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara tanpa bukti, catatan, atau laporan sejarah yang tersusun rapi dalam arsip terbitan. Data dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari gabungan data time series tahun 2014 - 2018. Dari data BPS, dan cross section 38 data yang mewakili 38 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur, menghasilkan 190 observasi. Menurut Widarjono (2005), data panel merupakan gabungan antara data deret waktu dan data penampang.

### 2.3 Metode Analisis Data

Metode regresi linier data panel digunakan untuk regresi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Eviews 9 digunakan sebagai alat pengolah data dalam penelitian ini. Data panel pada penelitian ini merupakan gabungan antara data time series dan data cross section.

## 3 HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Gambaran Umum

Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di pulau Jawa, selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur terletak pada 111.00 sampai 114.40 Bujur Timur dan 7.120 sampai 8.480 Lintang Selatan. Letak Provinsi Jawa Timur berada di sekitar Khatulistiwa, sehingga seperti provinsi lain di Indonesia, wilayah ini mengalami 2 kali pergantian musim setiap tahunnya yaitu musim kemarau dan musim hujan. Batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur adalah pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur meliputi 90 persen dari total luas Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km<sup>2</sup> terbagi menjadi 38 Kabupaten / Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota.

### 3.2 Hasil Analisis Data

Tabel 1 menunjukkan hasil dan estimasi regresi dengan model Fixed Effect Model yang dapat dilihat Besaran Perekonomian, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018, maka dapat diperoleh persamaan sebagai

berikut :

$$Y_y = 523455.4 + 00.015613PDRB_{it} - 0.011715UMP_{it} - 481.6116INF_{it} \quad (1)$$

Berdasarkan hasil analisis pendekatan Fixed Effect Model(FEM) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta Berdasarkan persamaan diatas didapatkan nilai konstanta sebesar 523455.4 yang berarti bahwa jika nilai dari variabel independen PDRB, Upah Minimum, dan Inflasi , sama dengan nol, maka kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 adalah sebesar konstanta 523455.4 jiwa.
2. PDRB (X1) Nilai koefisien dari variabel PDRB adalah bernilai 0.015613 yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel PDRB, akan meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 sebesar 0.015613 jiwa.
3. Upah Minimum (X2) Nilai koefisien dari variabel Upah Minimum adalah bernilai -0.011715 yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel Upah Minimum, akan menurunkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 sebesar 0.011715 jiwa.
4. Inflasi (X3) Nilai koefisien dari variabel Inflasi adalah bernilai -481.6116 yang berarti bahwa setiap kenaikan variabel Inflasi, akan menurunkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 sebesar 481.6116 jiwa.

**Uji Hipotesis Uji F** Variabel PDRB memiliki probabilitas sebesar  $0.0094 < \alpha=5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Variabel Upah Minimum memiliki probabilitas sebesar  $0.0172 < \alpha=5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Variabel Inflasi memiliki probabilitas sebesar  $0.7936 > \alpha= 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Koefisien determinasi  $R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien  $R^2$ . Koefisien determinasi merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh

variabel bebas (X). Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil perhitungan yang menunjukkan R – squared 0.987027 sehingga dapat diartikan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 dapat dijelaskan oleh variabel independen PDRB, Upah Minimum, dan Inflasi sebesar 98,70 sedangkan sisanya 1,30% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 3.3 Pembahasan

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kota Surabaya sebagai pusat ibu kota wilayah di Provinsi Jawa Timur mampu menarik minat investor untuk menyediakan lapangan pekerjaan misalnya pusat perbelanjaan, lingkungan akademisi, konstruksi, industri, dll. Tingginya peluang kerja yang ada di Kota Surabaya memberikan dampak positif terhadap probabilitas angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini selaras dengan Hukum Okun (Okun's Law) menjelaskan pengaruh (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, bahwa jika terjadi kenaikan (PDRB) terjadi di suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tersebut juga akan meningkat. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Maryam (2013) menunjukkan bahwa variabel produk (PDRB) kabupaten/kota berpengaruh positif sebesar 70,04% dan signifikan. Nilai elastisitas kesempatan kerja untuk sektor pertanian (0,61), sektor industri (1,97), sektor perdagangan (1,35), sektor jasa-jasa (0,63), dan sektor lain-lain (0,25). Penelitian Rimbawan (2013) menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka meningkatkan kesempatan kerja dari 10.000 jiwa, sedangkan elastisitas kesempatan kerja menunjukkan nilai kurang dari satu, artinya peran pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, UMP, PDRB, inflasi sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing. 0,0038 dan 0,0104. Penelitian Dewa (2015), menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali dan variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian Utami, (2009) menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Penelitian Lavianty (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai (PDRB). PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan pemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Produk Domestik Regional Bruto sebagai nilai barang-barang jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dari suatu Negara selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun ditambah hasil produksi barang dan jasa yang berada pada konsumen tingkat akhir. Adapun nilai tambah yang terjadi merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tingkat akhir (Irwan, 2010).

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten terendah di Provinsi Jawa Timur. Rendahnya Upah Minimum Kabupaten Pacitan dikarenakan rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga kesempatan kerja juga rendah. Hal ini sesuai dengan Teori Mankiw yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan mengenai upah minimum (sebesar  $W_1$ ) di atas tingkat keseimbangan yang terjadi adalah kekakuan upah. Upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Upah tidak akan turun (rigid) ke  $W_2$  akibat adanya kebijakan upah minimum sebesar  $W_i$ . Karena itu, sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi  $L_1$  sehingga timbul pengangguran sebesar  $L_2$  dikurangi (Mankiw, 2007:370).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wara (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan dengan hubungan positif

terhadap TPAK, variabel upah minimum (X2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPAK. Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa kesempatan kerja di pulau jawa dipengaruhi sebesar 99,6% oleh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi sedangkan 0,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dimana IPM, PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikan sebesar 0,0221; dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di pulau jawa dengan nilai signifikan sebesar 0,5425.

Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, UMP, PDRB, inflasi sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing. 0,0038 dan 0,0104. Penelitian Dewa (2015), menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali dan variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian Utami, (2009) menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Penelitian Lavianty (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Perubahan upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Bagi perusahaan upah merupakan biaya produksi sehingga pengusaha akan meminimalkan biaya produksi, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila harga naik, konsumen akan mengurangi konsumsi. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja. Karena semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, akan sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya perusahaan, perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga

kerja sebagai tindakan efisiensi, upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil tingkat keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu kenaikan tingkat upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja (Tambun Saribu, 2013).

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki nilai Inflasi tertinggi berada di Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur. Tingginya Inflasi di Kabupaten Pacitan dikarenakan rendahnya minat beli masyarakat terhadap produk/jasa sehingga terjadi keterlambatan perputaran uang. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kuantitas yang menyatakan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Menurut (Sukirno, 2010) teori kuantitas ini dibedakan menjadi tiga yaitu teori inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation), inflasi desakan biaya (cost push inflation), dan inflasi diimpor. Puspita (2006) menyatakan bahwa inflasi diukur adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi diukur oleh tingkat pertumbuhan dari deflator PDRB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa kesempatan kerja di pulau jawa dipengaruhi sebesar 99,6% oleh IPM, PDRB, UMP dan Inflasi sedangkan 0,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dimana IPM, PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikan sebesar 0,0221; dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di pulau jawa dengan nilai signifikan sebesar 0,5425.

Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, UMP, PDRB, inflasi sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing. 0,0038 dan 0,0104. Penelitian Dewa (2015), menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali dan variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian Utami, (2009) menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Penelitian Lavianty (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan

tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh inflasi yang terjadi berasal dari sisi penawaran. Inflasi penawaran adalah kenaikan inflasi karena meningkatnya biaya input (*cost push inflation*). Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran (*supply shock*) misalnya apabila terjadi musim kering yang mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam dan gangguan distribusi sehingga distribusi tidak lancar. Gangguan tersebut akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga barang-barang tersebut secara umum dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi (Suseno dan Astiyah, 2009:41). Dengan alasan tersebut, maka tidaklah tepat apabila perubahan jumlah kesempatan kerja yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dihubungkan dengan tingkat inflasi.

Jadi, permintaan terhadap tenaga kerja akan mengalami penurunan dikarenakan hal tersebut. Di Dalam kurva Philips dinyatakan bahwa inflasi yang rendah sering kali terjadi dengan pengangguran yang tinggi, sebaliknya pengangguran yang rendah bisa dicapai tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini adalah tingkat inflasi yang sudah membaik, tetapi tidak didukung oleh penurunan pengangguran yang ada, sehingga roda perekonomian macet.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki wilayah dengan PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur. PDRB Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding PDRB wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Kondisi perekonomian global yang sangat tidak menentu secara keseluruhan, sehingga terdapat tantangan yang akan dihadapi pemerintah seperti ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, masih melambatnya perekonomian China serta dinamika harga komoditas internasional menjadi tanta-

ngan eksternal. Meskipun demikian, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang berfluktuatif namun kinerja perekonomian Kota Surabaya diperkirakan tumbuh. Penempatan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat Kota Surabaya masih diperkirakan memberikan kontribusi terbesar yang didukung oleh daya beli masyarakat yang tinggi, program pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga untuk menahan laju inflasi serta tingginya investasi yang ditunjang oleh program program pembangunan pemerintah Kota Surabaya sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, UMP, PDRB, inflasi sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing. 0,0038 dan 0,0104. Penelitian Dewa (2015), menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali dan variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian Utami, (2009) menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Penelitian Lavianty (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Jumlah angkatan kerja yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan di Kota Surabaya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja terjadi karena Kota Surabaya merupakan salah satu kabupaten yang besar di Jawa Timur. Kota Surabaya yang memiliki perekonomian yang maju menjadi pendorong banyaknya pendatang dari luar Kota Surabaya yang ingin mencari pekerjaan di Kota Surabaya. Tidak hanya dalam bidang perekonomian yang maju namun juga dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah universitas negeri dan swasta yang ada di Kota Surabaya. Dengan banyaknya universitas menyebabkan pelajar dari luar Kota Surabaya dan dari dalam

wilayah Kota Surabaya yang menuntut ilmu untuk mendapatkan sarana pendidikan yang lebih baik dan pelajar yang telah lulus ingin mencari pekerjaan di Kota Surabaya sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja. Tidak terlepas kemungkinan bahwa seiring dengan keadaan tersebut menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Diharapkan dengan adanya jumlah angkatan kerja yang tinggi mampu mendorong pemerintah untuk membuka lowongan atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dibukanya kesempatan kerja yang baru akan dapat mengurangi angka pengangguran sehingga dengan begitu akan memberikan kelayakan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kota Surabaya dengan bekerja.

Hasil analisis data yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pengangguran dengan inflasi ini didukung Friedman (1976) yang mengatakan bahwa teori dasar dari kurva Phillips ini hanya terjadi pada jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang, karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku (*sticky price*), sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Berdasarkan analisis deskriptif, inflasi umum di Kota Surabaya dipengaruhi oleh, krisis moneter kenaikan kebutuhan bahan pokok, kenaikan biaya kesehatan, kenaikan harga BBM, bukan sebagai akibat tarikan permintaan seperti yang dijelaskan dalam kurva Philips, sehingga menyebabkan pengaruh angka inflasi terhadap tingkat kesempatan kerja di Kota Surabaya tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran Perekonomian berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB maka akan meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Tingkat Upah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Upah Minimum maka akan menurunkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Inflasi maka akan menurunkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018 jasa-jasa (0,63), dan sektor lain-lain (0,25). Penelitian Rimbawan (2013) menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka meningkatkan kesempatan kerja dari 10.000 jiwa, sedangkan elastisitas kesempatan kerja menunjukkan nilai kurang dari satu, artinya peran pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

Penelitian Nurhadiansyah (2017) menunjukkan bahwa peluang kerja di Pulau Jawa

dipengaruhi oleh 99,6% oleh IPM, UMP, PDRB, inflasi sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain, dimana IPM dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,0038 dan 0,0104. Penelitian Dewa (2015), menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, variabel PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali dan variabel Upah Minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Bali. Penelitian Utami, (2009) menunjukkan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel PDRB, angkatan kerja dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember. Penelitian Lavianty (2016) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel upah (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), variabel investasi (X2) dan variabel upah minimum (X3) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai (PDRB). PDRB merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan pemilikan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Produk Domestik Regional Bruto sebagai nilai barang-barang jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dari suatu Negara selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun ditambah hasil produksi barang dan jasa yang berada pada konsumen tingkat akhir. Adapun nilai tambah yang terjadi merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dikonsumsi oleh tingkat akhir (Irwan, 2010).

## 4 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi pelaku usaha di Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha di Taman Nasional Alas Purwo adalah negatif. Berkurangnya pen-

gunjung wisata serta penutupan sementara tempat wisata selama pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan para pelaku usaha. Penurunan tingkat pendapatan tersebut akan mempengaruhi perekonomian pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial pelaku usaha yakni menyebabkan pengangguran serta terjadinya perubahan jenis pekerjaan. Akan tetapi, di lingkungan instansi Taman Nasional Alas Purwo dan pengelolaan hotel tidak terjadi pengurangan tenaga kerja, tetap menjaga jumlah pekerja karena didasari oleh rasa kemanusiaan serta agar tidak meningkatkan pengangguran di sekitar Taman Nasional Alas Purwo. Sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat bekerja sebagai pedagang makanan dan jasa transportasi. Namun, setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi perubahan jenis pekerjaan yang semula berwirausaha kini beralih menjadi petani, kuli bangunan, berternak, penjual air bersih, serta penjual sayur keliling. Selain itu, sebagian pelaku usaha di Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki pekerjaan atau menganggur selama PPKM diberlakukan. Sehingga pandemi Covid-19 ini mempengaruhi aktivitas wisata yang berdampak terhadap pekerjaan para pelaku usaha.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka. Agustus. Banyuwangi: BPS Banyuwangi.
- Afrida, BR. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alghofari, F. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2017. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ali, Mohammad. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Jakarta: Grasindo.
- Amri. 2007. "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia" (online), <http://amriamir.wordpress.com>.
- Ananta, Prayudha. 2013. Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.
- Anto, Dajan. 1996. Pengantar Metode Statistik. Jilid Kedua. Jakarta: LP3ES.
- Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: YKPN.
- Azaini, R. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang Tahun 1998-2012. *Jurnal Ilmiah* 3 (2): 7-15.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur Tahun 2016. Jawa Timur: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Indonesia Dalam Angka. Indonesia Tahun 2017. Indonesia: BPS.
- Benoit. (2011). *Linear Regression Models with Logarithmic Transformations*. Methodology Institute, London.
- Bellante, Don dan Jackson, Mark, 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Boediono. 1991. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Boediono. (2013). *Ekonomi moneter (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5)*. Yogyakarta: BPFE.

- Daryanto, Arief dan Yundy Hafirianda. 2010. Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix Untuk Pembangunan Ekonomi daerah. PT. Penerbit IPBPress. Bogor.
- Deliarnov. 1995. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Devanto, dan Putu. 2011. "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkualitas: Tinjauan UUD 1945". Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No.4 Universitas Diponegoro.
- Dewi, I. 2013. Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 1 (3): 1-8.
- Dimas dan Nenek, W. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi 16 (1): 2-8.
- Disnakertrans. 2002. Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Disnakertransduk. 2012. Laporan Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Surabaya. Tidak Diterbitkan.
- Djojohadikusumo, S. 1994. Dasar Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Dernburg, dan Muchtar. 1992. Makro Ekonomi- Konsep, Teori dan Kebijakan Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kurniawan, A. P dan Herniwati, R. H. 2013. Analisis Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Purworejo. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Listyaningsih. W. D. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lukisari, D. 2007. Perencanaan Kebijakan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah. <http://www.bappenas.go.id/pnData/ContentExpress/413/Dyah%20Lukisari.doc> (8 maret 2018).

Maimun. 2003. Pengantar Ketenagakerjaan. Jakarta: PT. Pradana Pramita.

Mankiw, Gregory. 2012. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.